



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT II**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSPEKTORAT II**

**TAHUN 2019**

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, JANUARI 2020**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

### B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategik Inspektorat II sebagaimana yang tercantum dalam peran strategik Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good*

*governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN.

2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pada pembimbingan - pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut melalui PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.
4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat II memiliki peran strategis dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Tata Usaha

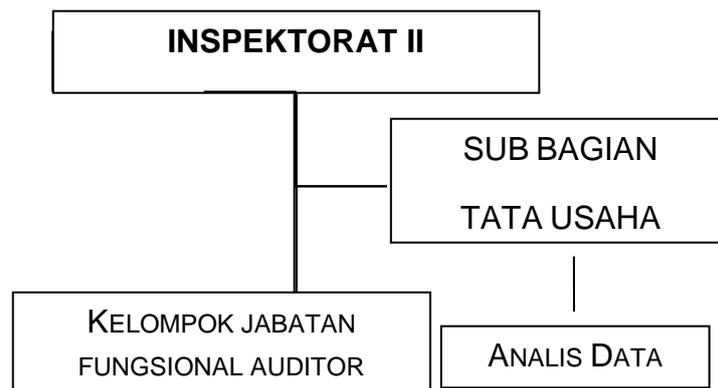
- Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.
- Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi.

## 2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2019 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha, dan 14 (empat belas) orang Auditor.

Struktur organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut:



#### D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
  - a) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, , dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
  - b) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.
2. Unit Vertikal Balai, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo; dan
3. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia, Yaitu:
  - a) Dinas perindag Prov. Sumatera Barat;
  - b) Dinas perindag Prov. Bengkulu;
  - c) Dinas perindag Prov. Sumatera Utara;
  - d) Dinas perindag Prov. Riau;
  - e) Dinas perindag Prov. Kepulauan Riau ( Kepri);
  - f) Dinas perindag Prov. Jambi;
  - g) Dinas perindag Prov. Sematera Selatan
  - h) Dinas perindag Prov. Bangka Belitung;
  - i) Dinas perindag Prov. Lampung;
  - j) Dinas perindag Prov. DKI Jakarta;
  - k) Dinas perindag Prov. Banten;
  - l) Dinas perindag Prov. Jawa Tengah;

- m) Dinas perindag Prov. DI. Yogyakarta;
- n) Dinas perindag Prov. Awa Timur;
- o) Dinas perindag Prov. Bali;
- p) Dinas perindag Prov. Nusa Tenggara Barat;
- q) Dinas perindag Prov. Nusa Tenggara Timur;
- r) Dinas perindag Prov. Kalimantan Utara;
- s) Dinas perindag Prov. Kalimantan Barat;
- t) Dinas perindag Prov. Kalimantan Tengah;
- u) Dinas perindag Prov. Kalimantan Selatan;
- v) Dinas perindag Prov. Kalimantan Timur;
- w) Dinas perindag Prov. Gorontalo;
- x) Dinas perindag Prov. Sulawesi Utara;
- y) Dinas perindag Prov. Sulawesi Barat;
- z) Dinas perindag Prov. Sulawesi Tengah;
- aa) Dinas perindag Prov. Sulawesi Tenggara;
- bb) Dinas perindag Prov. Maluku Utara;
- cc) Dinas perindag Prov. Maluku;
- dd) Dinas perindag Prov. Papua;
- ee) Dinas perindag Prov. Papua Barat.

## **E. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat II telah menyusun kegiatan tahun 2019 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2019, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2019 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 yakni :

- Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2014 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2015. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Inspektorat II juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat II agar

penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat II melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja eselon I** dan **Monev Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian ( Monev Penilaian Maturitas SPIP)**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

##### **1. Visi**

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah “Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

##### **2. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

### 3. Tujuan Pengawasan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inpektorat Jenderal mempunyai tujuan **“Melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian”** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

### 4. Strategi pengawasan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparatur pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan sesuai Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat II merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

#### 1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

#### 2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

#### 3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

#### 4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan

- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5. Kebijakan Pengawasan
    - a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
    - b. Menerapkan audit berbasis resiko.
  6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 37 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 2 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 1 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.
  7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

    - a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
    - b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
    - c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

## **B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2019 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2015 – 2019, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut:

### **Perspektif *Stakeholder***

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat II.
3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri diukur dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti.
4. Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5.

### **Perspektif Proses Internal**

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan laporan keuangan Satker yang berkualitas.

### **Perspektif Pembelajaran Organisasi**

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP diukur dengan indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti diklat dari seluruh pegawai Inspektorat II,

- jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan;
2. Organisasi yang efektif diukur dengan indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
  3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja tersedia dan terpeliharanya sistem pengawasan berbasis informasi.

Tabel 1. Rencana Kinerja TA 2019

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
		1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan*)IKU	95	Persen
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85	Persen
		3. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3	Persen
		4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60	Persen
		5. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75	Persen

		6. Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80	Persen
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
		1. Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72	Persen
		2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85	Persen
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50	Persen
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Nilai

### C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Inspektorat II pada tahun 2019 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran awal sebesar Rp.3.489.800.000,- dan setelah pemotongan menjadi sebesar Rp.3.389.800.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Revidu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan

Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2019

Kode	Uraian	Volume	Jumlah
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II		3.389.800.000
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawasam dan pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	7 Laporan	475.338.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		31.081.000
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II		31.081.000
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan akuntabilitas		16.865.000
A	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II		16.865.000
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya		427.392.000
A	Koordinasi Pengawasan Inspektorat II		427.392.000
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	7 laporan	67.839.000
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		67.839.000
A	Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN		34.366.000
B	Reviu Pengendalian Internal Atas Laporan keuangan (PIPK) Satuan kerja Cakupan tugas Inspektorat II		33.473.000
1842.003	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	2 laporan	774.313.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II		3.173.000

052	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan		771.140.000
1842.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	2.072.310.000
052	Pelaksanaan audit internal		1.542.489.000
053	Pelaksanaan audit khusus		83.060.000
055	Reviu perencanaan anggaran		9.186.000
056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan		437.575.000

#### **D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019, sasaran Inspektorat II pada tahun 2019 berubah menjadi seperti tabel 1.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (assurance) melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.
2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (consulting) melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.

3. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien melalui layanan Reviu RKA-KL satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.
4. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif melalui layanan Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2019 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA 2019

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
		7. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan*)IKU	95	Persen
		8. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85	Persen
		9. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3	Persen
		10. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60	Persen
		11. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75	Persen

		12. Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80	Persen
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
		3. Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72	Persen
		4. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85	Persen
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50	Persen
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Nilai

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** Inspektorat II Tahun 2019 di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal yaitu :

1. **Persentase laporan keuangan satuan kerja sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan;**
2. **Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerjacakupan tugas;**

- 3. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti;**
- 4. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti;**
- 5. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan.**

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
  - a. Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
  - b. Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
  - c. Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
  - d. Audit Khusus;
  - e. Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan.
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
  - a. Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan Semester II;
  - b. Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
3. Layanan Moitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
  - a. Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan ( Monev SPIP dan Monev Program Revitalisasi Sentra IKM ) ;
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
  - a. Penyusunan Program Kerja dan Anggaran;
  - b. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II;
  - c. Peningkatan Peran Pengawasan lain.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2019. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

#### A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 yaitu :

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>						
		S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	57,14%	Tidak tercapai target
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	62%	Tidak tercapai target
		S3	Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089%	Tercapai Target

		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%	Tercapai Target
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ditjen ILMAT E 78,44 (BB)</li> <li>▪ Ditjen IkMA 81,42 (A)</li> </ul>	Tidak Tercapai Target
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100	Tercapai Target
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>						
		T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	79%	Tercapai Target
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%	Tercapai Target

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	Tercapai Target
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	81,96 (A)	Tidak tercapai Target

Dari indikator kinerja yang telah dilakukan penjelasan akan dijabarkan sebagai berikut:

**1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (assurance)**

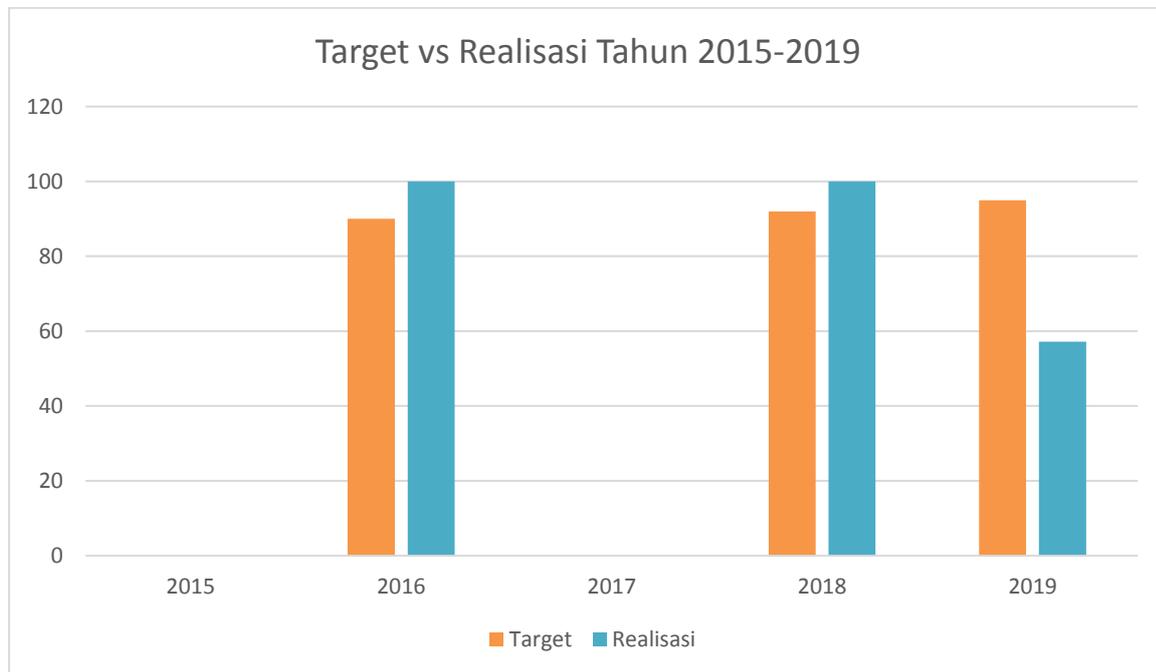
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ( <i>assurance</i> )	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	57,14%
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	62%
		3. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089%

		4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%
		5. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	(0%)Tidak tercapai
		6. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100

1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan target 95% realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 57,14% dimana telah dilakukan Reviu Laporan Keuangan/Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2018 dan Semester I Tahun Anggaran 2019 pada satker cakupan tugas Inspektorat II (Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE) dan telah sesuai SAP serta peraturan perundang-undangan. Namun pada Tahun Anggaran 2019 ini Reviu Laporan Keuangan/BMN pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) belum dianggarkan secara mandiri karena keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan reviunya dilakukan bersamaan dengan Direktorat Jenderal IKMA. Untuk pelaksanaan Reviu Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satuan kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Tahun Anggaran 2019 belum dilakukan dikarenakan reviu tersebut baru dilakukan untuk Laporan Keuangan/BMN Tahunan 2019 yang baru dilaksanakan bulan Januari 2020.

Realisasi tahun 2015 - 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	95 %	57,1 4%	92 %	100 %	-	-	90 %	100 %	-	-



**GRAFIK 1. TARGET VS REALISASI TAHUN 2015-2019**

2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas target 85% realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 63,64% dimana Total Rekomendasi 363 Rekomendasi, yang belum sesuai rekomendasi 28 dan yang belum ditindaklanjuti 104 dari Satker cakupan tugas Inspektorat II. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas belum mencapai target karena adanya perubahan Tata Kelola Pengawasan Intern sedang dalam tahap perubahan proses tindak lanjut dan ada beberapa temuan yang masih butuh waktu untuk ditindaklanjuti. Untuk penyelesaian selanjutnya dilaksanakan di tahun Anggaran berikutnya. Realisasi tahun 2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
----	----------------------------	-------------------	--------	-----------

1.	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	63,64%
----	---	--	-----	--------

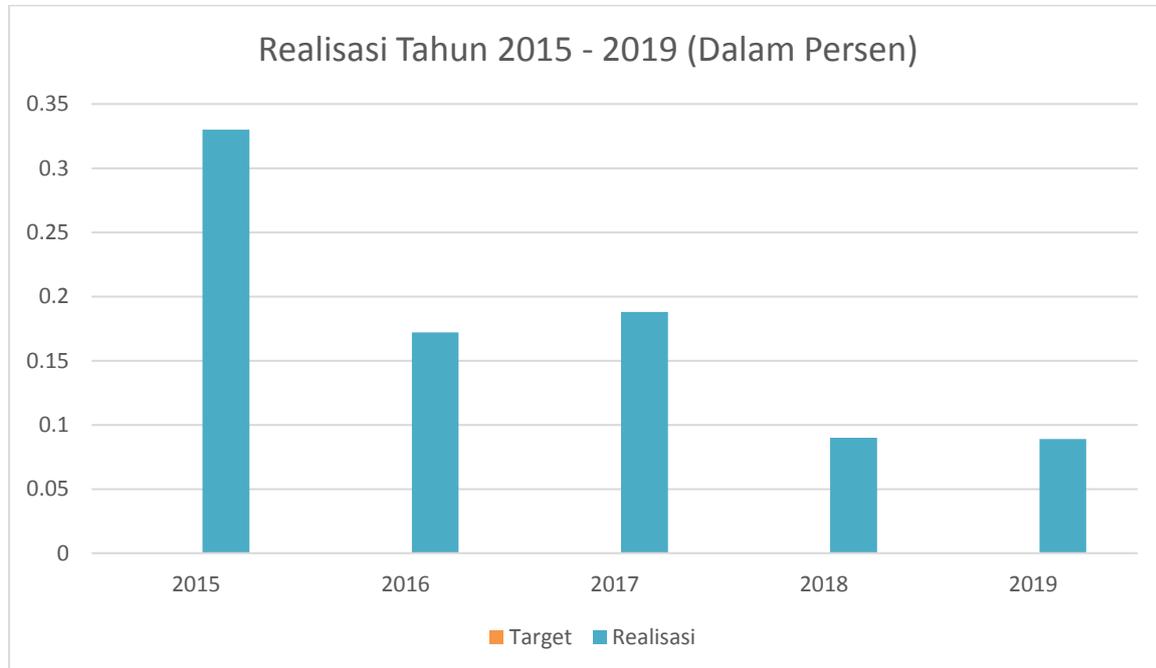
3. Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* dengan target <3% dengan capaian sebesar 0,089% dimana temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.523.945.584,94,- dari anggaran Kementerian Perindustrian TA 2018 sebesar Rp 2.827.854.807.000,-.

Dari tahun 2015 dan 2017 untuk indikator mengenai Prosentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* capaiannya kurang dari 3%. Untuk tahun 2015 dapat dicapai dengan realisasi 0,3324%, dimana temuan pemeriksaan yang bersifat material senilai Rp.8.830.323.972,43,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.656.276.729.000,- dan Untuk tahun 2016 dapat dicapai dengan realisasi 0,172%, dimana temuan pemeriksaan yang bersifat material senilai Rp.4.714.030.164,- dari total anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.743.315.143.000,- untuk pemeriksaan tahun 2017 sebesar 0,188%, dan untuk tahun pemeriksaan 2018 sebesar 0,094 dimana capaian tersebut masih dibawah 3% dari target yang ditetapkan kurang dari 3%. Berdasarkan hasil temuan BPK total kerugian Negara sebesar Rp. 2.281.171.482.42- dari total realisasi anggaran Kementerian Perindustrian TA 2017 Rp. 2.432.089.589.850,-

Realisasi tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	T	R	T	R	T	R	T	T
			2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1	Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap	3. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089%	<3 %	0,094%	<3 %	0,188%	<3 %	0,172%	<3 %	0,3324%

perundang - undangan												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



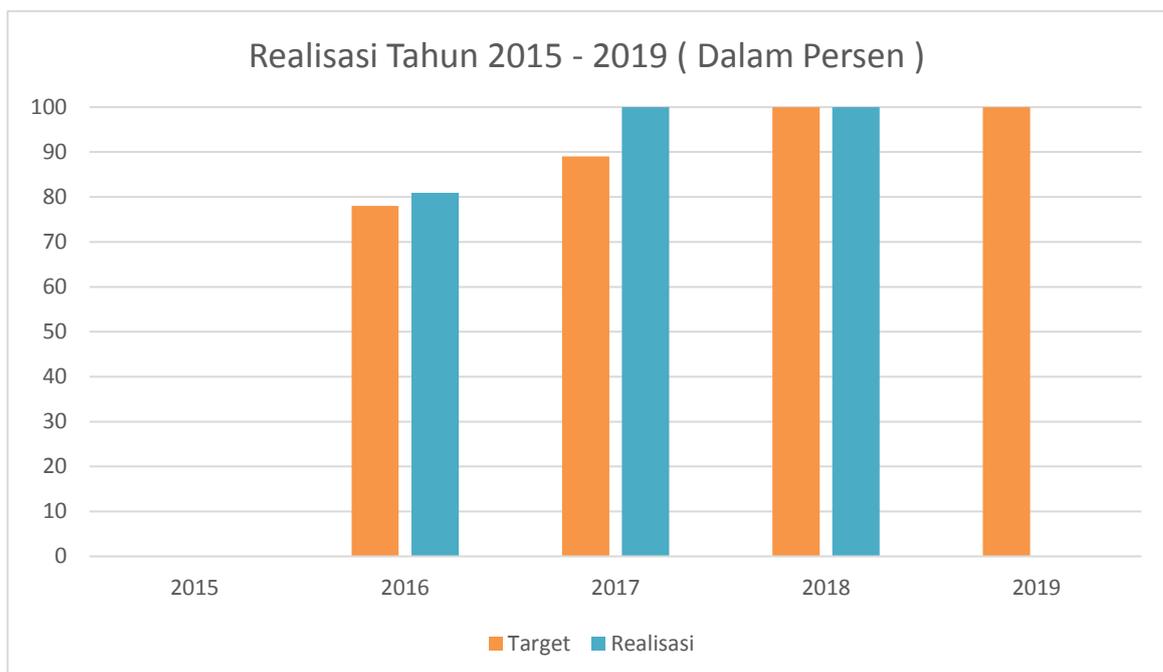
**GRAFIK 2. REALISASI TAHUN 2015-2019**

4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan target 60% realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 100 % dimana dari 4 Rekomendasi tingkat Kementerian sudah ditindaklanjuti semua ( 4 Rekomendasi ). Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 167%.

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang undangan	4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%

5. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA target 75% dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 78.44 (BB) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 81,42 (A), nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II tidak tercapai target.
6. Realisasi tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
			2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015
1.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	0%	100%	100%	89%	100%	78 %	80,92 %	-	-



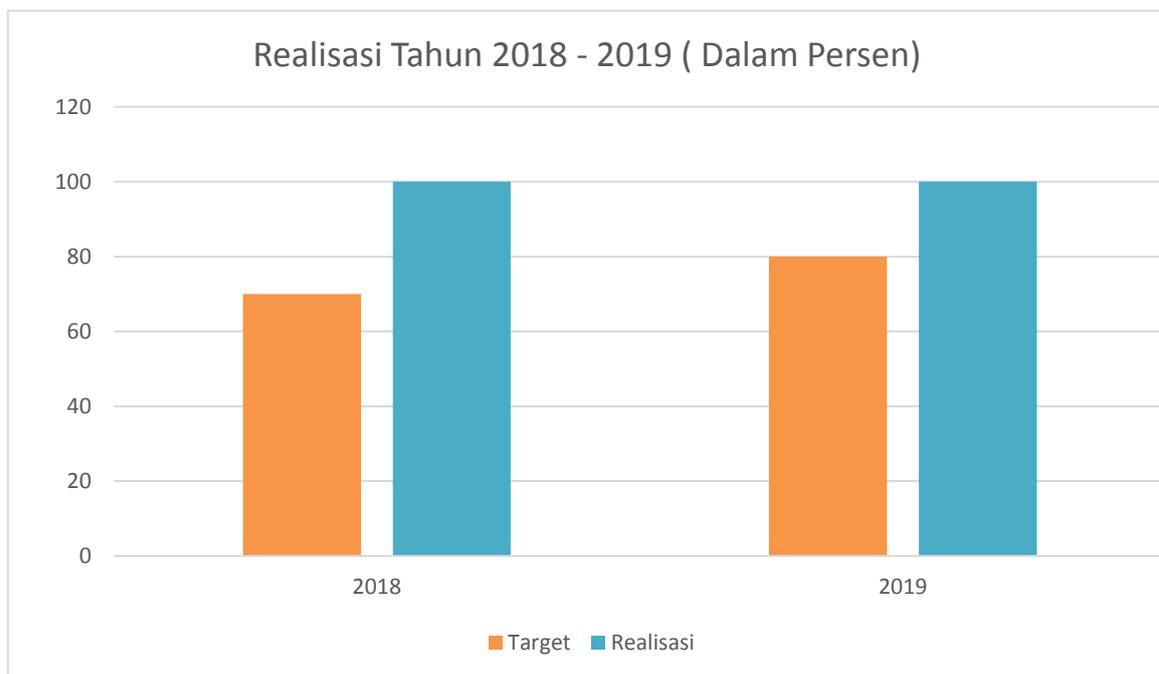
**GRAFIK 3. REALISASI TAHUN 2015 - 2019**

7. Persentase jumlah rekomendasi hasil rewiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti target 80% realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 100 % dari

semua Rekomendasi Hasil Catatan Reviu RKA-K/L terhadap pagu definitive Anggaran TA 2020. Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 125%.

Realisasi tahun 2018 - 2019 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2018	R 2018
1.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal ( <i>consulting</i> )	6. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100%	70%	100%



**GRAFIK 4. REALISASI TAHUN 2018-2019**

## 2. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif

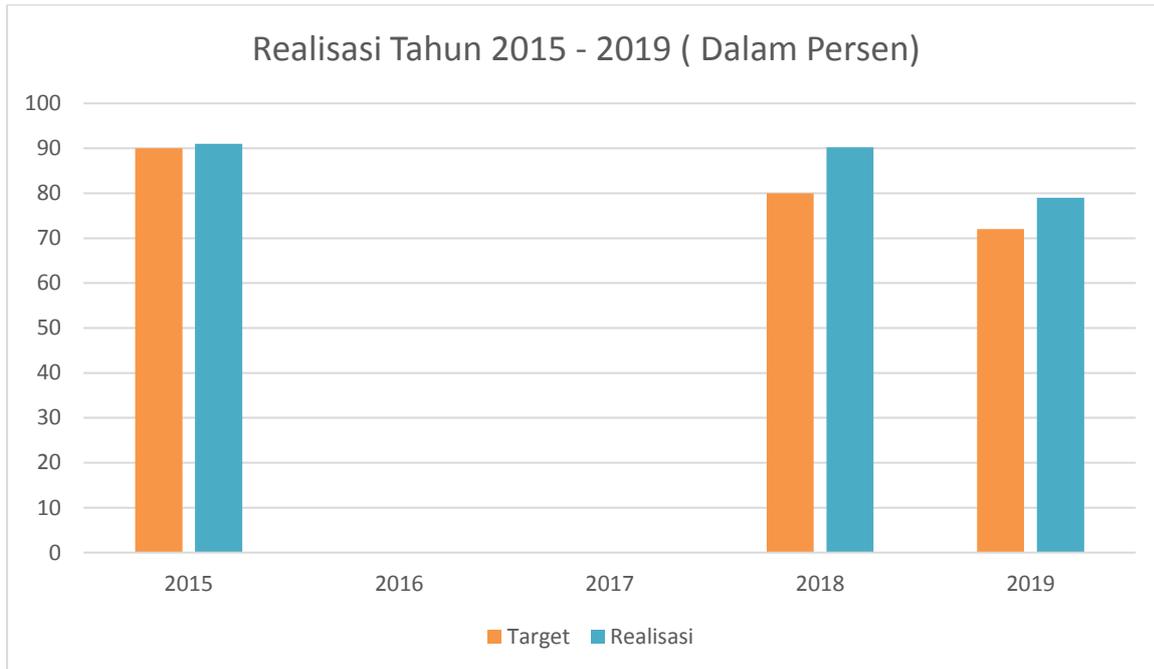
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	1. Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	79%
		2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%

1. Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) target 72% realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 79% dari hasil pelaksanaan pengawasan yaitu kegiatan Audit pada : Ditjen ILMATE, Ditjen IKMA, audit dana dekonsentrasi pada Provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Maluku, Lampung, Kalsel, NAD, Jawa Tengah, Sultra, Sulut, NTB, Sulbar, DKI Jakarta, Bali, NTT, DI Yogyakarta, Gorontalo, Kaltim, Jatim, Sumsel, Kaltara, Banten, Maluku Utara, Jambi, Sumut, Babel, reviu LK/BMN Semester I TA 2018 dan Semester II TA 2019 pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA, Audit Triwulan IKMA, Monev Revitalisasi Sentra DAK pada Kota Palangkaraya dan Tasikmalaya serta Kabupaten Serdang Bedagai, Tanah Datar,

Bengkulu Utara, Lampung Timur, Garut, Gunung Kidul, Kulon Progo, Cilacap, Gianyar, Lombok Tengah, Boyolali dan Bandung, serta Audit BMDTP pada beberapa perusahaan yang memiliki realisasi rendah. Pelaksanaan jumlah pengawasan sampai dengan triwulan IV telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 79% telah sesuai dengan PKPT. Nilai 79% didapat dengan menghitung capaian PKPT di setiap bulannya antara rencana penugasan dengan ketercapaian. Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 110%.

Realisasi tahun 2015-2019 sebagai berikut:

N o	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2018	R 2018	T 2017	R 2017	T 2016	R 2016	T 2015	R 2015
2.	Terselenggara nya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Pers entase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaa n Program Kerja Pengawasa n Tahunan (PKPT)	72%	79%	80%	90,20 %	-	-	-	-	90 %	91 %

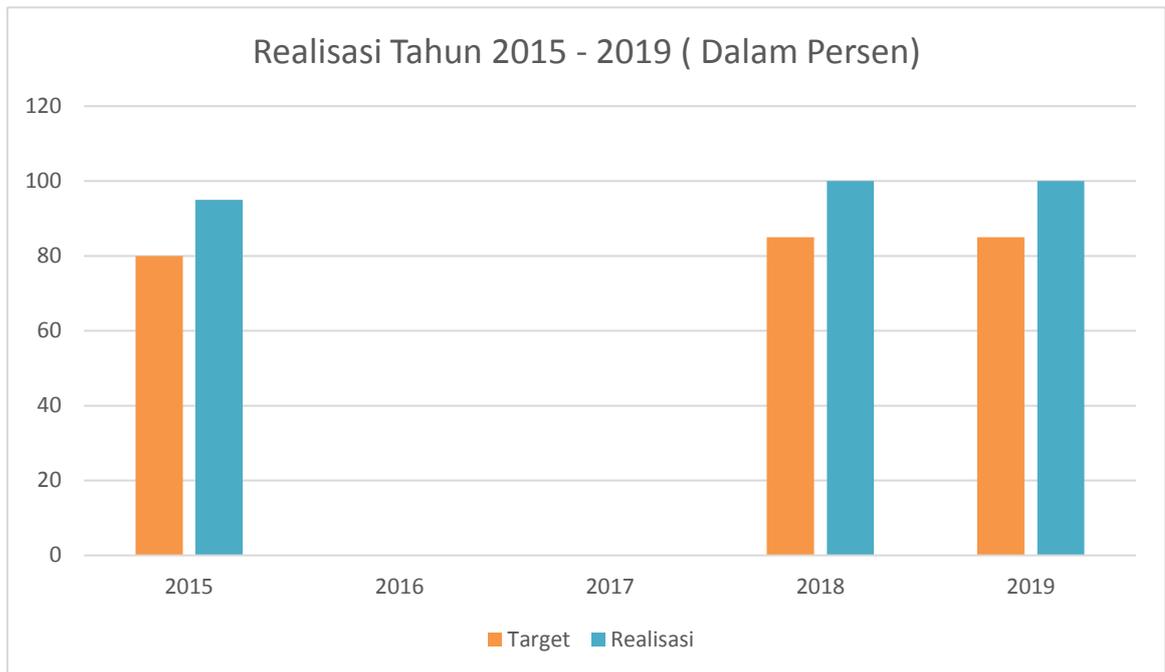


**GRAFIK 6. REALISASI 2015 – 2019**

2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan target 85% realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 100 %. Dimana setiap pelaksanaan penugasan dan pelaporan audit sudah dilengkapi dengan kartu kendali sebagai standar mutu pengawasan. Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 118%.

Realisasi tahun 2015-2019 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2018	R 2018	T 2017	R 2017	T 2016	R 2016	T 2015	R 2015
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85%	100%	85%	100%	-	-	-	-	80%	95%



**3. GRAFIK 7. REALISASI TAHUN 2015-2019**

**kegiatan pengawasan yang mudah diakses.**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	1.Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50%	100%

1. Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT target 50% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah 75 %. Dimana perhitungannya berdasarkan pelaksanaan audit di Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE, BPIPI dan pelaksanaan Reviu LK/BMN Semester II TA 2018 dan Semester I TA 2019 pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA, Pengawasan Triwulanan, Monitoring dan Evaluasi SPIP, dan Reviu RKA KL yang data – data pengawasannya diambil/ diunduh dari aplikasi berbasis IT, antara lain data realisasi anggaran yang berasal dari aplikasi E-mon, data pengadaan dari LPSE,

pelaksanaan kegiatan dari ALKI dan capaian kinerja dari Monev Perkin. Sehingga capaiannya melebihi target yang ditetapkan sebesar 133%.

#### 4. Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
4.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	1.Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	81,96 (A)

1. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal target nilai AA dimana realisasi sampai dengan Triwulan IV adalah Nilai A ( 81,96 ) Tidak tercapai target.

#### ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019.***

##### **Capaian Kinerja Tahun 2015**

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
		Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B,

				Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi
<b>Perspektif Proses Internal</b>				
		Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
<b>Perspektif Pembelajaran Organisasi</b>				
		Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang

		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
		Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

### Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%

		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
		Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

### Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%

2	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100%  BPPI 87,41 atau AA  IKTA 86,17 atau AA
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 satuan kerja	23 satuan kerja

### Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>				
		1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	92%	100%

		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	0,094%
		1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3	100%	100%
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100%	100% BPPI 86,95 (AA) IKTA 85,50 (AA)
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90%	100%
<b>Perspektif Proses Bisnis Internal</b>				
		1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiew perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70%	100%
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2 SOP	2 SOP
		1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80%	90,20%
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85%	100%

### Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	KET
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>						
		S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	50%	
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	63,64%	
		S3	Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089253 %	
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%	
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	(0%)Tidak tercapai	
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100	
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>						

2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	79%	
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%	
<b>PESFEKTIP KELEMBAGAAN</b>						
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	Tidak tercapai target	

**REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS  
INSPEKTORAT II TAHUN 2015 – 2019**

	Outcome/  Sasaran Strategis (SS)	Penjelasan Outcome/  Sasaran Strategis					Target						Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		-8	-9	-10	-11	-12
S1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan																

S2	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	IK 1.2	Prosentase temuan BPK di bawah materiality treshold	Persen	<3	<3	<3	<3	■	-	0,172	0,188	0,094	0,089	■
		IK 2.1	Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I minimal B	Persen	78	89	100	100	■	-	80,92	100	100	100	■
		IK 2.2	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	Rekomendasi	1	1	1	1	■	-	1	1	1	-	■

				IK 2.3	Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat II terhadap unit pusat, unit vertical, dan dana Dekonsentrasi perindustrian		Satuan Kerja	23	23	23	23	■	-	23	23	23	-	■
--	--	--	--	-----------	--	--	--------------	----	----	----	----	---	---	----	----	----	---	---

Capaian Kinerja Inspektorat II yang dibandingkan dengan target nasional yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

AN 20 x Buku III RPJMN x PERPRES NOMO x LAMPIRAN PER x Perpres No. 79 x Pemin

5-2019.pdf

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Rpjmn 2015-2019 Bidang Aparatur Negara**

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019	Sumber
<b>A Sasaran 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel</b>					
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
a.	Kementerian/Lembaga	%	74	95	BPK
b.	Provinsi	%	52	85	BPK
c.	Kabupaten	%	18	60	BPK
d.	Kota	%	33	65	BPK
2.	Tingkat Kapabilitas ASN	Skor 1-5	1	3	BPKP
3.	Tingkat Implementasi SPIE Kematangan	Skor 1-5	1	3	BPKP
4.	Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP)				
a.	Kementerian/Lembaga	%	39,3	85	Kemenpan dan RB
b.	Provinsi	%	27,3	75	Kemenpan dan RB
c.	Kabupaten/Kota	%	0,8	50	Kemenpan dan RB
5.	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	30 (2013)	80	LKPP
<b>B Sasaran 2: Pemerintahan yang Efektif dan Efisien</b>					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional	Skor 1-100	33,48	83,48	Kemenpan dan RB
a.	Kementerian/Lembaga	Skor 1-100	50	100	Kemenpan dan RB
b.	Provinsi	Skor 1-100	38,33	88,33	Kemenpan dan RB
c.	Kabupaten/Kota	Skor 1-100	28,33	78,33	Kemenpan dan RB
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86	BKN

7-28 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

u 1.pdf ^ Perpres Nomor 79 ....pdf ^ Perpres Nomor 79 ....pdf ^ LAP SPD capacity.doc

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Opini WTP atas laporan keuangan (K/L; prov; kab; kota) (%)	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00
	52,00	57,00	64,00	73,00	78,00	85,00
	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00
	41,00	46,00	51,00	56,00	61,00	65,00
Persentase K/L; prov; kab/kota) yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	47,00	53,00	59,00	61,00	69,00	75,00
	N/A	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	N/A	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00
Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%)	60,24	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
	30,30	39,00	48,00	57,00	66,00	75,00
	2,38	11,50	21,00	30,50	40,00	50,00
Tingkat e-procurement (%)	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Tingkat kapabilitas APIP level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	20,00	40,00	56,00	85,00
	N/A	5,00	20,00	40,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00
Tingkat Kepatuhan K/L; prov; kab/kota dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) (%)	64,00	70,00	80,00	58,00	78,00	100,00
	15,00	25,00	35,00	55,00	77,50	100,00
	50,00	60,00	70,00	54,50	77,25	100,00
	5,00	10,00	20,00	30,50	45,25	60,00
Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	25,00	45,00	55,00	85,00
	N/A	10,00	25,00	45,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00

Keterangan : \*) tidak ada target capaian pertahun sesuai dengan RPJMN 2015-2019

\*\*) data capaian tidak tersedia karena tidak dilakukan survei

Dimana capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2019 sesuai dengan target yang tertuang di RPJMN 2015 – 2019 adalah :

- Target dalam RPJMN untuk sasaran Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%) dengan capaian nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II Tahun 2019 yaitu, Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 78,44 (BB) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 81,42 (A);

1. Target dalam RPJMN untuk sasaran Tingkat kematangan Implementasi SPIP dengan target level 3 dengan capaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar **3,827**.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2019 sebesar Rp. 3.201.341.105,- atau 94,44% dari Pagu Anggaran Inspektorat II Rp. 3.389.800.000,- (Anggaran setelah pemotongan) berdasarkan data *online monitoring SPAN*. Pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari *laporan triwulan dengan Online monitoring SPAN* karena terdapat realisasi yang belum diinput dalam aplikasi laporan triwulanan pada saat pembuatan laporan PP 39. Realisasi anggaran TA 2018 sebesar Rp 2.841.739.700,- atau 96,44% dari Anggaran Rp. 2.946.799.000,- (Anggaran setelah Revisi) berdasarkan data *online monitoring SPAN*. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2%.

Tabel 3. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2019

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.489.800.000	<b>3.389.800.000</b>	<b>3.201.341.105</b>	<b>94.44</b>	<b>188.458.895</b>	<b>99,00</b>
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawasam dan pelaporan Kinerja	401.236.00	<b>475.338.000</b>	<b>458.317.242</b>	96.42	<b>17.020.758</b>	<b>100,00</b>

	Pengawasan Inspektorat II						
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	33.731.000	31.081.000	30.542.000	98,26	<b>539.000</b>	100,00
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan akuntabilitas	18.865.000	16.865.000	16.545.000	97,98	<b>320.000</b>	100,00
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	348.640.000	427.392.000	<b>411.230.242</b>	96,22	<b>16.161.758</b>	<b>100,00</b>
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	37.546.000	67.839.000	38.469.000	56,70	<b>29.370.000</b>	
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	37.546.000	67.839.000	38.469.000	56,70	<b>29.370.000</b>	<b>57,14</b>
1842.003	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	758.565.000	774.313.000	<b>770.759.377</b>	99,54	<b>3.553.623</b>	<b>100,00</b>
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II	16.973.000	3.173.000	3.173.000	100	<b>0</b>	100
052	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	741.592.000	771.140.000	<b>767.586.377</b>	99,54	<b>3.553.23</b>	<b>100,00</b>
1842.965	Layanan Audit Internal	2.292.453.00	2.072.310.000	1.933.795.486	93,31	138.514.514	
052	Pelaksanaan audit internal	1.734.590.000	1.542.489.000	1.482.359.686	96,10	60.129.314	
053	Pelaksanaan audit khusus	83.060.000	83.060.000	<b>24.726.800</b>	29,76	<b>58.333.200</b>	<b>100,00</b>

055	Reviu perencanaan anggaran	36.485.000	9.186.000	9.186.000	100	0	100
056	Pembinaan pengawasan Kinerja dan keuangan	438.318.000	437.575.000	417.523.000	95.42	20.052.000	100

**Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Online Monitoring SPAN TA  
2019**

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi Online Monitoring SPAN		Realisasi PP 39	
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	<b>3.489.800.000</b>	<b>3.389.800.000</b>	<b>3.201.341.105</b>	<b>94.44</b>	<b>3.170.473.943</b>	<b>93.53%</b>
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawasam dan pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	401.236.00	<b>475.338.000</b>	<b>458.317.242</b>	96.42	<b>458.320.900</b>	<b>96.42%</b>
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	37.546.000	67.839.000	<b>38.469.000</b>	56.71	<b>38.471.497</b>	<b>56.71%</b>
1842.003	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	758.565.000	774.313.000	<b>770.759.377</b>	99.54	<b>747.676.633</b>	<b>96.56%</b>
1842.965	Layanan Audit Internal	2.292.453.00	2.072.310.000	<b>1.933.795.486</b>	93.32	<b>1.926.004.914</b>	<b>96,28%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3.489.800.000</b>	<b>3.389.800.000</b>	<b>3.201.341.105</b>	<b>94.44</b>	<b>3.170.473.943</b>	<b>93.53%</b>

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
<b>Perspektif Pemangku Kepentingan</b>								
		1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	57.14%	-Reviu Laporan Keuangan dan BMN	67.839.000	38.469.000	56.71
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	62%	-Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan satker binaan.	427.392.000	411.230.242	96.21
		3. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0.089253 %	-Pelaksanaan Audit Internal -Pelaksanaan audit khusus -Pembinaan pengawasan kinerja dan keuangan	2.072.310.000	1.933.789.486	93.32
		4. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata	60%	100%	-Monitoring dan evaluasi kebijakan industry dan	774.313.000	770.759.377	99.54

		kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU			tata kelola pemerintahan sesuai kebijakan pemerintahan			
		5. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	0%	-Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan Inspektorat II	<b>3.173.000</b>	<b>3.173.000</b>	100
		6. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100%	-Reviu perencanaan Anggaran	<b>9.186.000</b>	<b>9.186.000</b>	100
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>								
		1. Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	79%	-Penyusunan program kerja dan anggaran	<b>31.081.000</b>	<b>30.542.000</b>	98.26
		2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu	85 %	100%	-			

		pengawasan *) IKU						
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>								
3.	Terselenggara nya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	-			
4.	Terselenggara nya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	0% (Tidak tercapai target)	-			

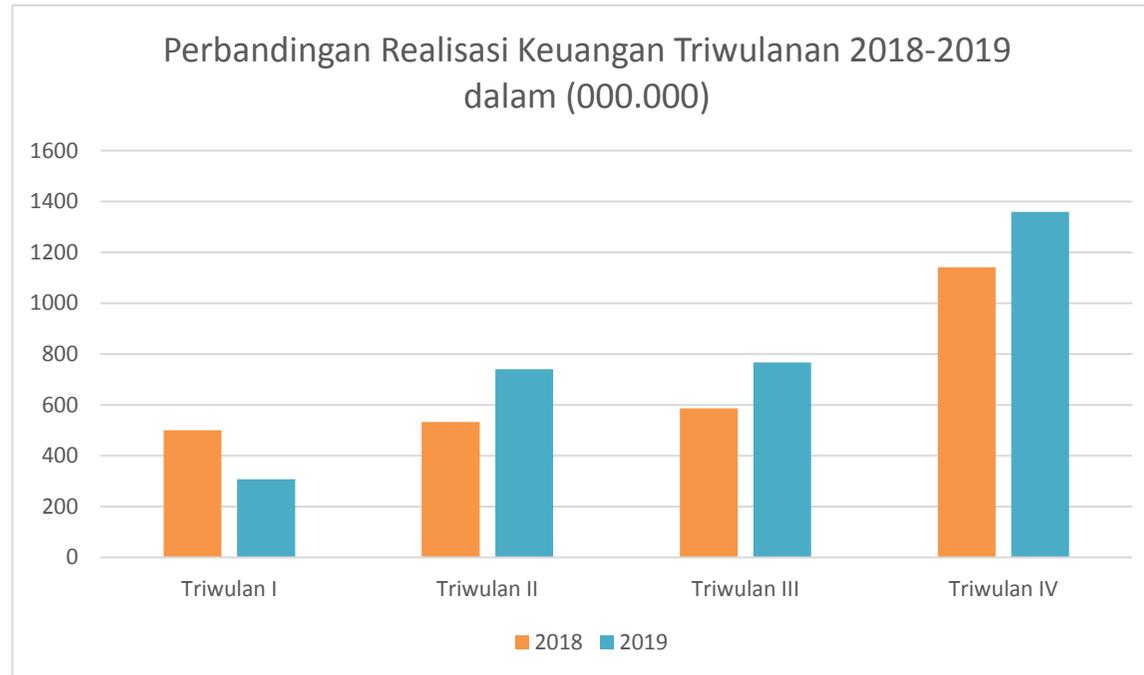
Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2018 - 2019 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Keuangan per Triwulan 2019 berdasarkan Data Aplikasi PP39**

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	475,388,000	93,433,155	134,286,816	105,141,773	124,681,157	458,320,900	96.42
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	67,839,000	14,970,805	4,646,972	18,845,674	0	38,471,497	56.71
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	774,313,000	0	58,821,915	34,785,549	654,139,622	747,676,633	96.56
4	Layanan Audit Internal	2,072,310,000	198,827,040	542,067,958	607,497,601	579,832,338	1,926,004,914	92.94
	<b>TOTAL</b>	<b>3,389,800,000</b>	307,231,000	<b>739,823,660</b>	<b>766,270,596</b>	<b>1,358,653,118</b>	3,170,473,943	93.53

**Realisasi Keuangan per Triwulan 2018 berdasarkan Data Aplikasi PP39**

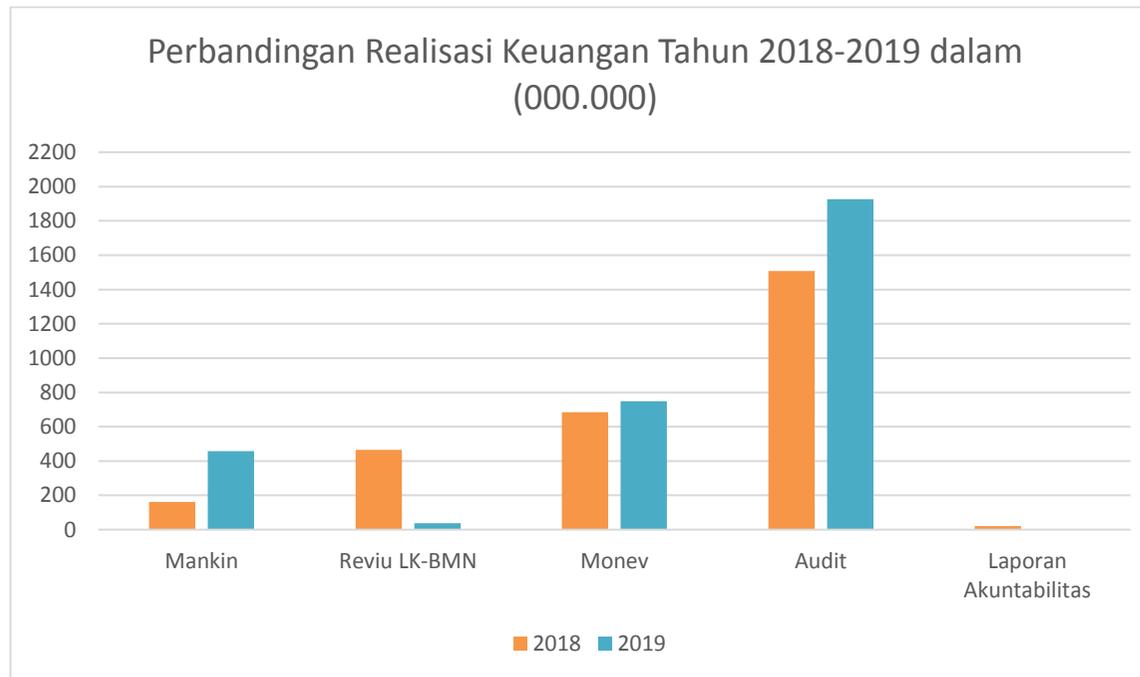
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Laporan Hasil Audit Inspektorat II	1,549,333,000	299,580,786	362,200,605	330,480,003	468,673,232	1,490,148,479	96,18
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat II	504,662,000	150,936,064	66,033,334	211,346,624	33,055,361	461,311,534	91,41
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II	686,598,000	26,843,726	34,985,340	3,058,830	597,340,260	681,105,216	99,20
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II	166,250,000	20,690,152	66,289,552	33,126,352	36,907,500	160,065,500	96,28
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	39,936,000	1,999,469	3,603,043	7,810,771	5,906,534	19,325,030	48,39
	<b>TOTAL</b>	<b>2,946,779,000</b>	<b>500,050,197</b>	<b>533,111,874</b>	<b>585,822,580</b>	<b>1,141,882,887</b>	<b>2,811,955,759</b>	<b>95,43</b>



**GRAFIK 9. REALISASI KEUANGAN TRIWULANAN TAHUN 2018-2019**

### Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan 2019

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2018	2019	Perbedaan	2018	2019	Perbedaan
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	166,250,000	439,150,000	(272,900,000)	<b>161,597,200</b>	458,320,900	296,723,700
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	504,662,000	67.839,000	(436,823,000)	<b>466,247,500</b>	38,471,497	(427,776,021)
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	686,598,000	774,313,000	87,715,000	<b>684,130,100</b>	747,676,633	63,546,533
4	Layanan Audit Internal	1,549,333,000	2,072,313,000	522,980,000	<b>1,508,836,900</b>	1,926,004,914	417,168,014
5	Laporan Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II	39,936,000	-	(39,936,000)	<b>20,928,000</b>	-	(20,928,000)
	<b>Total</b>	<b>2,946,779,000</b>	<b>3,389,800,000</b>	<b>(74,347,000)</b>	<b>2,841,739,700</b>		<b>(328,734,226)</b>



**GRAFIK 10. REALISASI KEUANGAN TAHUN 2018-2019**

Berdasarkan perhitungan diatas, pada realisasi keuangan tahun 2019 terdapat efisiensi anggaran sebagai berikut :

1. Program/ kegiatan Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II.  
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2018) yaitu sekitar 164,2% ( Rp. 272,900,000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sekitar 0,14%;
2. Program/ kegiatan Hasil Reviu Inspektorat II.  
Pada Program/kegiatan ini terjadi penurunan anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2018) yaitu sekitar 86,56% (Rp. 436,823,000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2018 mengalami penurun sekitar 34,7%;
3. Program/ kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II.  
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2018) yaitu sekitar 12,72% (Rp. 87,715,000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2018 mengalami penurun sekitar 2,64%;
4. Program/ kegiatan Hasil Audit Inspektorat II.  
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2018) yaitu sekitar 33,75% (Rp. 522.980.000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2018 mengalami peningkatan sekitar 0,24 %.

Selain itu terdapat perbedaan antara realisasi pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *online monitoring* SPAN. Hal ini disebabkan pada aplikasi PP39 masih terdapat beberapa SPTJB yang belum diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai laporan ini diselesaikan. Sementara itu aplikasi *online monitoring* SPAN telah memperhitungkan pengembalian terhadap kas negara dan rekonsiliasi/pembetulan.

Pencapaian Realisasi Kinerja tahun 2019 sebesar 99% dibandingkan target Jangka Menengah tahun 2019 pada Renstra sebesar 90 %, sehingga capaiannya sebesar 110% dari target yang ditetapkan. Realisasi Kinerja Inspektorat II lebih tinggi di bandingkan target Jangka Menengah yang ada pada Renstra.

Pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Indikator Kinerja Presentase nilai laporan keuangan Inspektorat Jenderal sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan tahun 2019 tidak diukur di Inspektorat II, karena sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang diukur adalah laporan keuangan Inspektorat Jenderal saja yang merupakan bagian pengawasan Inspektorat

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA**

##### **A. KEBERHASILAN**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2019, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2019 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019.

##### **B. PERMASALAHAN/KENDALA**

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2019 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan masih mengalami penundaan jadwal dikarenakan adanya audit dari BPK RI dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Itjen.
2. Adanya perbedaan nilai realiasi keuangan yang tercantum dalam laporan triwulan dengan e-monitoring.

##### **C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun 2020.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.

3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2020 agar tidak terulang kembali.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 17 Januari 2020

*W* Inspektur II



**Wawas Swathatafrijiah**